

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2018 - 2020 PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

*ANALYSIS OF THE BUDGET REALIZATION REPORT AT THE REGIONAL OFFICE OF THE
MINISTRY OF RELIGION OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:
Sheila Desti Rahmi¹
Jenny Morasa²
Victorina Z. Tirayoh³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

¹sheilachandra22@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³vitrayoh@yahoo.com

Abstrak: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari anggaran yang telah dibuat di awal kegiatan beserta penggunaannya pada saat kegiatan dengan bukti-bukti transaksi sebagai bukti atas pengeluaran dana untuk kegiatan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja LRA diukur menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis vertikal dan analisis horizontal. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio efektivitas tidak diketahui. Kesimpulan analisis kinerja LRA selama 3 tahun berdasarkan rasio efektivitas tidak diketahui, rasio efisiensi pada tahun 2018 berada pada kategori sangat efisiensi, pada tahun 2019 dan 2020 kurang efisiensi. Lalu berdasarkan analisis horizontal pendapatan dan belanja mengalami tren naik dan berdasarkan analisis vertikal pos belanja yang paling besar menggunakan anggaran dari total belanja ialah pos belanja pegawai tahun 2018.

Kata Kunci: Rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis horizontal, dan analisis vertikal

Abstract: The Budget Realization Report (LRA) is an accountability report for the use of funds from the budget that has been made at the beginning of the activity and its use during the activity with evidence of transactions as evidence of the expenditure of funds for the activity. The purpose of this study was to determine the performance of LRA measured using the effectiveness ratio, efficiency ratio, vertical analysis and horizontal analysis. This research was conducted at the Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi province. The data analysis method used is descriptive quantitative method. The results of the analysis of the LRA's performance for 3 years based on the effectiveness ratio are unknown. The conclusion of the analysis of LRA's performance for 3 years based on the effectiveness ratio is unknown, the efficiency ratio in 2018 is in the very efficiency category, in 2019 and 2020 it is less efficient. Then based on a horizontal analysis of income and expenditure, there is an upward trend and based on a vertical analysis, the largest expenditure item using the budget from total expenditure is the 2018 employee expenditure post.

Keywords: Effectiveness ratio, efficiency ratio, horizontal analysis, and vertical analysis

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mewujudkan *Good Governance* sangat diperlukan untuk pelaporan akuntansi sektor publik dalam hal ini instansi pemerintahan. Diperlukannya perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dan menentukan kebijakan. Anggaran kegiatan merupakan salah satu komponen utama dalam suatu instansi pemerintahan. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan, anggaran kegiatan menjadi faktor penting yang sangat sensitif. Setiap instansi pemerintahan memiliki anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mulyawan, dan Alia (2020) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN itu berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (rentang waktu antara 1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Ketika adanya anggaran dalam melaksanakan kegiatan otomatis dibutuhkan penyajian laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang akan digunakan. Salah satu komponen wajib yang harus dipenuhi dalam Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dari anggaran yang telah dibuat di awal kegiatan beserta penggunaannya pada saat kegiatan dengan bukti-bukti transaksi sebagai bukti atas pengeluaran dana untuk kegiatan tersebut. Ini dirancang agar supaya dapat kita ketahui dengan jelas perihal Perencanaan Anggaran yang telah diberikan untuk anggaran-anggaran kegiatan yang akan digunakan untuk realisasinya yang telah direncanakan terlebih dahulu. Agar supaya ada kesesuaian antara anggaran yang diestimasikan dan juga anggaran yang digunakan untuk realisasi. LRA harus menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah direalisasikan sesuai dengan penyerapan dana yang nantinya akan digunakan untuk realisasi yang sesuai dengan APBN/APBD dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Renaldi (2021) Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Penilaian keberhasilan suatu entitas dalam mencapai tujuannya diukur agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maupun internal. Pengukuran terhadap laporan keuangan harus menggunakan suatu analisis agar mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, perlu diadakannya sebuah analisis laporan keuangan dengan cara menilai pos-pos keuangan dalam laporan keuangan dalam suatu periode menjadi persentase, dan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode agar dapat diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau sebaliknya serta gambaran terhadap perkembangan atau kecenderungan yang terjadi pada perusahaan. Analisis tersebut adalah analisis persentase per komponen atau yang sering disebut dengan analisis vertikal dan analisis horizontal. Makaminang, Ilat, dan Wokas (2022) Pengukuran tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi laporan realisasi anggaran sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi transparansi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan atau penggunaan anggaran keuangan daerah karena anggaran dalam pemerintah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan apabila penggunaan anggaran telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien maka hal ini akan mendorong terwujudnya tujuan pemerintah yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja LRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara diukur menggunakan rasio efektivitas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja LRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara diukur menggunakan rasio efisiensi.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja LRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara diukur menggunakan analisis vertikal.
4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja LRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Utara diukur menggunakan analisis horizontal.

TINJAUAN PUSTAKA**Landasan Teori****Akuntansi**

Hans Kartikahadi, dkk. (2019:3) memberikan definisi Akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang menggunakan cara tertentu dalam ukuran moneter transaksi dalam kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Zamzami dan Nusa, 2019:54).

Pemerintah Daerah

Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan dapat disimpulkan sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pramudiana, 2020). Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat meliputi aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Mentu dan Sondakh, 2019:39).

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Riyani dan Widayanti (2022, 480) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi pemerintahan adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Selain itu, akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan publik.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Runtuwene dan Gamaliel (2019:4504) mendefinisikan SAP adalah merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang didalamnya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara akuntansi pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD. Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai kekuatan hukum didalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna, auditor dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018: 15) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Istilah akuntansi sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap ilmu (Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum) memiliki cara pandang yang berbeda. Dari sudut pandang ekonomi dan disiplin akuntansi sektor publik dipandang sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembiayaan dan pemerintahan pusat ke pemerintah daerah, tetapi lebih penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan. Aspek-aspek tersebut antara lain Lembaga yang terlibat (misalnya penyusunan standar, badan pengawas dari pemerintah atau pasar modal, organisasi profesi, dan entitas pelapor), peraturan yang berlaku termasuk PABU (Prinsip Askuntansi Berterima Umum). Laporan keuangan hanyalah salah satu medium penyampaian informasi. Laporan keuangan pada dasarnya adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas pelaporan sumber daya dipercayakan kepadanya.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Rukayah dkk (2017:4) bahwa LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Secara sederhana LRA merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu.

Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sementara Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah (Trianto, 2022: 56).

Rasio Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumberdaya oleh satu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administrative) dan keluaran yang dihasilkan. Jadi singkatnya bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan sumber daya, waktu, tenaga yang minimum secara optimal dengan hasil output yang maksimal.

Analisis Vertikal

Metode analisis vertikal (statis) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Disebut Metode Statis karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Analisis Vertikal menitikberatkan pada hubungan finansial antar pos-pos laporan keuangan satu periode (Tinambunan, 2020: 47).

Analisis Horizontal

Menurut Harahap (2009:227) Analisis horizontal (Dinamis) adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui perubahan-perubahan berupa kenaikan atau penurunan akun-akun laporan keuangan atau data lainnya dalam dua atau lebih periode yang dibandingkan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Rukayah, Kusumawati, dan Afriani (2017) bertujuan menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dari rasio efektivitas Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan pada tahun 2014 dan jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin peningkatan sehingga melebihi target yang ditentukan.

Penelitian Sajow, Morasa, dan Wokas (2017) bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran belanja daerah pada pemerintah Kota Tomohon dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu dari tingkat efektivitas belanja, Kota Tomohon dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat Efisiensi Belanja, Kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan Kabupaten Minahasa Selatan.

Penelitian South, Morasa, dan Tirayoh (2022) bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa periode 2016-2020. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan pajak daerah dari badan pengelolaan pajak dan retribusi Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2016-2019 sangat efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2020 kurang efektif karena adanya pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode kualitatif deskriptif ini digunakan sebagai upaya menganalisa Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (field research). Metode ini dilakukan dengan melaksanakan observasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi dan wawancara.

Metode dan Proses Analisis Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan keadaan yang ada dalam lapangan kemudian mengadakan analisis data-data yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data dari objek penelitian melalui proses wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh data tentang LRA di Kanwil Kemenag Sulut periode tahun 2018 sampai dengan 2020, dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh dari objek penelitian. Peneliti memulai dengan mempelajari tentang LRA di Kanwil Kemenag Sulut Tahun 2018-2020. Apakah LRA Kanwil Kemenag Sulut sudah efektif dan efisien atau belum, dan bagaimana kinerja keuangan Kemenag Sulut apabila diukur menggunakan analisis vertikal dan analisis horizontal. Kemudian peneliti melakukan perbandingan agar terciptanya kesesuaian anatara hasil yang diperoleh dari objek penelitian sehingga mampu memenuhi tujuan yang dicapai, dan memberikan kesimpulan akhir dan saran terhadap analisis LRA di Kanwil Kemenag Sulut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pos pendapatan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Sulawesi Utara dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Pendapatan lain-lain pada tahun 2018 berupa penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp. 33.717.000,-, tahun 2019 sebesar Rp. 16.272.500,-, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.650.000,-. Adapun pendapatan lain-lain pada tahun 2020 berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp. 370.026,-.
2. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha pada tahun 2020 berupa pendapatan penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp. 225.160.508,-, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp. 12.350.000,-, dan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp. 418.572,-.
3. Pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) sebesar Rp. 3.624,-.

Dari penjabaran laporan realisasi anggaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dinyatakan efisien dan realisasi anggaran dilaksanakan dengan baik pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan anggaran yang ada di kantor Kementerian Agama ini dana anggaran yang akan dianggarkan oleh kantor Kementerian Agama berasal dari kas negara yang dipegang oleh Menteri Keuangan Negara. Apabila ada sisa dana anggaran (SILPA) maka sisa anggaran tersebut dikembalikan kepada kas Negara.

Pembahasan

Rasio Efektivitas

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2020 rasio efektivitas tidak diketahui, karena untuk mengetahui efektivitasnya suatu laporan realisasi anggaran tersebut harus ada anggaran pendapatan.

Tabel 1. Efektivitas Pendapatan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	0	33,717,000
2019	0	16,272,500
2020	0	241,952,500

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kementerian Agama Provinsi Sulawesi utara tidak membuat anggaran pendapatan pada awal tahun sehingga efektifitas pendapatan yang diperoleh tidak diketahui. Berdasarkan data pendapatan tahun 2018 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 terjadi penurunan, tetapi di tahun 2020 nilai pendapatan naik. Tidak ada anggaran disebabkan karena pendapatan bersumber dari setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau setoran pengembalian.

Rasio Efisiensi

Dari hasil penelitian yang di lakukan di Kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara berdasarkan total belanja yang didapatkan dari perhitungan Rasio efisiensi pada tahun 2018 dikategorikan sangat efisien dengan rasio yang didapat sebesar 0,58%. Namun pada tahun 2019 dan 2020 total belanja dikategorikan kurang efisien dikarenakan rasio yang didapatkan masing-masing sebesar 98,41% dan 97,87%.

Tabel 2. Efisiensi Belanja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

	Tahun 2018			Efisiensi
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	2,338,453,000	79,693,927		3.41
Belanja Barang	11,233,030,000	0		0.00
Belanja Modal	135,000,000	0		0.00
Total Belanja	13,706,483,000	79,693,927		0.58

	Tahun 2019		
	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
Belanja Pegawai	2,298,585,000	2,290,315,661	99.64
Belanja Barang	10,032,942,000	9,943,812,458	99.11
Belanja Modal	40,000,000	40,000,000	100.00
Belanja Bantuan Sosial	221,250,000	119,050,000	53.81
Total Belanja	12,592,777,000	12,393,178,119	98.41
	Tahun 2020		
	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
Belanja Pegawai	164,172,218,000	175,596,457,214	106.95
Belanja Barang	61,87,824,000	53,081,473,078	85.77
Belanja Modal	36,542,776,000	28,308,802,799	77.46
Belanja Bantuan Sosial	4,949,250,000	4,890,750,000	98.81
Total Belanja	267,552,068,000	261,877,483,091	97.87

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa efisiensi belanja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori sangat efisien pada tahun 2018. Namun di tahun 2019 hanya pos belanja bantuan sosial yang berada pada kategori sangat efisien, sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berada pada kategori kurang efisien. Dan di tahun 2020 hanya pos belanja modal yang berada pada kategori efisien, sedangkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial berada pada kategori kurang efisien.

Analisis Horizontal

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Sulawesi Utara dari periode 2018 sampai dengan periode 2020, pendapatan yang didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan trend naik dengan peningkatan sebesar 569,33% atau Rp. 191.962.870,- pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Dan dari realisasi total belanja juga menunjukkan trend naik dengan peningkatan sebesar 312.953,09% atau Rp. 249.404.611.045,- pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Pada sisi laporan realisasi belanja Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pos-pos yang mengalami peningkatan secara signifikan ialah pos belanja pegawai dengan peningkatan sebesar 217.364,67% atau Rp. 173.226.447.626,-

Tabel 3. Analisis Horizontal LRA Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	2018	2019	2020	Pertumbuhan
Pendapatan	33,717,000	16,272,500	241,952,370	569.33
Belanja Pegawai	79,693,927	2,290,315,661	175,596,457,214	217,364.67
Belanja Barang	0	9,943,812,458	53,081,473,078	-
Belanja Modal	0	40,000,000	28,308,802,799	-
Belanja Bantuan Sosial	0	119,050,000	4,890,750,000	-
Total Belanja	79,693,927	12,393,178,119	261,877,483,091	312,953.09

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan di tahun 2018 sebesar Rp. 33.717.000 kemudian di tahun 2019 sebesar Rp. 16.272.500 atau mengalami penurunan sebesar -51,73%, lalu di tahun 2020 nilai pendapatan sebesar 241,952,370 atau mengalami peningkatan sebesar 517,60% . Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp. 79.693.927 kemudian tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp. 12.393.178.119 dengan peningkatan 15,451% dan di tahun 2020 realisasi belanja sebesar 261.877.483.091 dengan peningkatan sebesar 312.953,09%. Pada tahun 2018 tidak ada belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sementara di tahun 2019 pengeluaran belanja pegawai sebesar Rp. 2.290.315.661, belanja barang Rp. 9.943.812.458, belanja modal Rp. 40.000.000 dan belanja bantuan sosial sebesar Rp. 119.050.000. Di tahun 2020 pengeluaran belanja pegawai sebesar Rp. 175,596,457,214, belanja barang Rp. 53,081,473,078, belanja modal Rp. 28.308.802.799, dan belanja bantuan sosial Rp. 4.890.750.000,-.

Analisis Vertikal

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bahwa pos belanja yang paling besar menggunakan anggaran dari total belanja ialah pos belanja pegawai. Yang artinya total belanja banyak dikurangi oleh belanja pegawai. Untuk laporan realisasi belanja menunjukkan hasil yang cukup optimal. Hal tersebut dilihat dari seringnya terjadi penurunan dan peningkatan pada presentase pos-pos belanja tahun 2018 sampai dengan 2020.

Tabel 4. Analisis Vertikal LRA Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Realiasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Persentase 2018	Persentase 2019	Persentase 2020
Belanja Pegawai	79,693,927	2,290,315,661	175,596,457,214	100	18.48	67,05
Belanja Barang	0	9,943,812,458	53,081,473,078	0	80.24	20,26
Belanja Modal	0	40,000,000	28,308,802,799	0	0.32	10,80
Belanja Bantuan Sosial	0	119,050,000	4,890,750,000	0	0.96	1,86
Total Belanja	79,693,927	12,393,178,119	261,877,483,091			

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa di tahun 2018 100% belanja digunakan untuk belanja pegawai. Di tahun 2019 persentase belanja pegawai sebesar 18,48% dari total belanja, kemudian persentase belanja barang terhadap total belanja sebesar 80,24%, persentase belanja modal terhadap total belanja sebesar 0,32% dan persentase belanja bantuan sosial terhadap total belanja sebesar 0,96%. Lalu di tahun 2020 presentase belanja pegawai sebesar 67,05% dari total belanja. Kemudian presentase belanja barang terhadap total belanja sebesar 20,26%, presentase belanja modal terhadap total belanja sebesar 10,80% dan presentase belanja bantuan sosial terhadap total belanja sebesar 1,86%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio efektivitas menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh tidak diketahui. Tidak ada pendapatan disebabkan karena pendapatannya bersumber dari setoran penerimaan negara bukan pajak (PNPB) atau setoran pengembalian.
2. Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa belanja Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 berada pada kategori sangat efisien namun di tahun 2019 hanya pos belanja bantuan sosial yang berada pada kategori sangat efisien, sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal berada pada kategori kurang efisien. Lalu di tahun 2020 tidak ada pos yang termasuk dalam kategori sangat efisien hanya pos belanja modal yang berada dikategori efisien, selain itu pos belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial berada pada kategori tidak efisien.
3. Berdasarkan analisis horizontal laporan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara total belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebesar 312.953,09%.
4. Berdasarkan analisis vertikal laporan realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2018 realisasi anggaran 100% digunakan untuk belanja pegawai. Lalu ditahun 2019 realisasi anggaran paling banyak digunakan untuk pos belanja barang dari total belanja.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kementerian agama Provinsi Sulawesi Utara lebih mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memperbaiki pengelolaan dalam penggunaan anggaran belanja agar lebih ditingkatkan efisiensinya.
2. Dalam perencanaan sebisa mungkin merasionalkan belanja sehingga belanja yang dikeluarkan dapat lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Makaminang, E.N., Ilat. V., Wokas, R.N.H. Evaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkososBudKum*. Vo. 6, No. 1, Hal. 325-334. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/download/42162/37360>
- Mulyawan, W., Alia, W. 2020. Apbn Dan Pendapatan Nasional. *Jurnal Islamic Economics Journal*. Vo. 1, No. 2, Hal. 59-67. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7929/0>
- Renaldi. 2021. Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi Bppsdmp. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*. Vol.2, No.1, Hal.103-114. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jamak/index>
- Rukuyah, R., Kusumawati, N., dan Afriani, I.A. 2017. Analaisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas dan Rasio Evisiensi pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. 4(2): 1-11. <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/246>
- Runtuwene, K.S., dan Gamaliel, H. 2019. Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Dana Dekonsentrasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 7(4): 4504. ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/25242>
- Sajow, C., Morasa, J., dan Wokas, R.N.H. 2017. *Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*. 5(2): 1193-1314. ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16122>
- South, C., Morasa, J., dan Tirayoh, V. 2022. Analisis Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Minahas. *Jurnal EMBA*. 10 (1): 917-925. ISSN: 2303-1174. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/38488>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintah Daerah. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Okt//ober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.